

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2016-2018 disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang tahun anggaran 2016-2018 sangat kurang, pada tahun 2016 kontribusi BUMD terhadap PAD sebesar 0,02 %, dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,01% kemudian pada tahun 2018 kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Kupang turun lagi menjadi 0,001%.
2. Kontribusi/proporsi BUMD Pemerintah Kota Kupang secara simultan relatif pos-pos PAD lainnya terlihat sangat kurang karena dibandingkan dengan pos-pos Pendapatan Asli Daerah, kontribusi BUMD lebih rendah dibandingkan pos-pos PAD lainnya yaitu sebesar 7,79%. Kontribusi Pajak daerah dirata-ratakan dari tahun 2016-2018 sebesar 52.21%. Retribusi daerah sebesar 18,77% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 18,77%. Dengan ini BUMD sangat kurang membantu dalam PAD sehingga PAD dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan.

#### **6.2 Saran**

1. Perlu adanya pengelolaan yang lebih baik lagi untuk BUMD-BUMD Pemerintah Kota Kupang, khususnya dalam menghasikan laba agar

dapat membantu PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, melalui peningkatan keahlian dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai.

2. Untuk PT Sasando, harus memperbaiki tata kelola manajemennya agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan PT sasando harus meningkatkan kinerjanya agar tiap tahun tidak mengalami kerugian.
3. Untuk PDAM Kota Kupang, perlu meningkatkan kinerja yaitu tentang respon pelanggan terhadap keluhan pelanggan, profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan serta pemasangan jaringan atau sambungan pada rumah pelanggan. Dengan begini harapan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan bisa menghasilkan laba sehingga dapat berkontribusi untuk PAD Kota Kupang.
4. Untuk PD Pasar sebaiknya menaikkan tarif sewa lapak dan kios. Sebaiknya dikenakan tarif berbeda untuk setiap volume barang dan jenis barang yang dijual.
5. Untuk Pemerintah Daerah Kota Kupang, sebaiknya lebih memperhatikan BUMD yang ada yang ada di Kota Kupang. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap BUMD yang ada. Sehingga bisa dilakukan evaluasi mengenai kinerja BUMD yang ada. Sebab jika tidak ada pengawasan, pemerintah daerah tidak bisa menilai

seberapa baik dan buruknya kinerja BUMD, agar yang baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang buruk bisa dibenahi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Purnama Putra. 2016. *Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Clara Aprilia Santo Tifanybale. 2017. *Analisis Kontribusi Laba Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2013-2015*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang.
- Fahmi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: ALFABETA.
- Ike Juni Antika. 2017. *Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syari'ah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Pertama. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Stice, Stice dan Skousen. 2009. *Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga
- Soemarsono. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekoisia.
- Srimindarti, C. 2006. *Balanced Scorecard Sebagai Alternative Mengukur Kinerja*. Semarang: STIE Stikubank.
- Tampubolon, Manahan P. 2005. *Manajemen Keuangan ( Finance Management): Konseptual, Problem & Studi Kasus*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang *Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom*

- \_\_\_\_\_,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1996 tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.*
- \_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- \_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan pemerintah Daerah.*
- \_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*